

Selat Hormuz, Geopolitik, dan Ancaman Krisis Energi Dunia

Oleh: Alvin Noor Sahab R | Tanggal Upload: 11 Juli 2026



OPINI – Di tengah meningkatnya rivalitas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, perhatian dunia kembali tertuju pada sebuah jalur laut sempit yang hanya memiliki lebar efektif beberapa kilometer, tetapi menentukan denyut ekonomi global. Jalur tersebut adalah Selat Hormuz, penghubung Teluk Persia dengan Teluk Oman yang selama beberapa dekade menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Hampir seperlima konsumsi minyak global dan lebih dari seperlima perdagangan gas alam cair (LNG) dunia melintasi selat ini setiap hari. Fakta tersebut menjadikan Selat Hormuz bukan sekadar wilayah geografis, melainkan instrumen strategis yang mampu memengaruhi stabilitas politik, keamanan internasional, hingga harga energi dunia.

Konflik yang berkembang di Selat Hormuz selama ini sering dipahami sebatas perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, dinamika kawasan ini jauh lebih kompleks. Selat Hormuz merupakan titik temu antara kepentingan geopolitik, geostrategi, hukum laut internasional, dan keamanan energi global. Karena itu,

setiap peningkatan eskalasi militer di kawasan ini hampir selalu diikuti oleh gejolak pasar minyak internasional.

Secara geografis, Selat Hormuz memiliki karakteristik yang unik. Jalur pelayaran utama hanya terdiri atas dua koridor selebar sekitar 3,2 kilometer yang dipisahkan oleh zona penyangga. Kondisi tersebut menyebabkan kapal tanker raksasa harus melewati jalur yang sangat sempit sehingga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Posisi inilah yang menjadikan Selat Hormuz sebagai salah satu *strategic chokepoint* terpenting di dunia.

Nilai strategis tersebut semakin meningkat karena sebagian besar ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Iran bergantung pada jalur ini. Negara-negara Asia seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan merupakan konsumen terbesar minyak yang melewati Selat Hormuz. Ketergantungan tersebut membuat setiap ancaman penutupan selat segera direspons oleh lonjakan harga minyak dan meningkatnya kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global.

Perspektif geopolitik menjelaskan bahwa penguasaan jalur pelayaran sama pentingnya dengan penguasaan wilayah daratan. Alfred Thayer Mahan, tokoh teori kekuatan maritim, menegaskan bahwa dominasi terhadap jalur perdagangan laut merupakan fondasi utama kekuatan negara. Dalam konteks ini, kehadiran Armada Kelima Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia bukan hanya bertujuan menjaga kebebasan navigasi, tetapi juga mempertahankan pengaruh strategis Amerika terhadap distribusi energi dunia.

Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai bagian dari mekanisme pertahanan nasionalnya. Ancaman untuk menutup selat sering digunakan sebagai instrumen diplomasi koersif dalam menghadapi sanksi ekonomi maupun tekanan politik dari Barat. Bagi Teheran, kemampuan mengganggu lalu lintas pelayaran memberikan efek penyeimbang terhadap keunggulan militer Amerika Serikat. Strategi ini merupakan bentuk *asymmetric deterrence*, yaitu menciptakan tekanan ekonomi global tanpa harus terlibat dalam perang terbuka.

Perubahan karakter konflik di Selat Hormuz juga menunjukkan transformasi bentuk peperangan modern. Jika pada dekade 1980-an kawasan ini dikenal melalui “Perang Tanker” antara Iran dan Irak, kini ancaman lebih banyak diwujudkan melalui perang hibrida. Serangan pesawat nirawak, ranjau laut, kapal cepat, penyitaan kapal dagang, hingga operasi siber menjadi instrumen baru yang mampu menciptakan ketidakpastian tanpa harus memicu deklarasi perang secara resmi.

Dalam situasi demikian, hukum internasional menghadapi tantangan besar. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebenarnya menjamin hak lintas damai (*innocent passage*) dan hak lintas transit (*transit passage*) bagi kapal-kapal internasional. Namun, implementasi kedua prinsip tersebut sering kali berbenturan dengan klaim kedaulatan negara pantai. Perbedaan interpretasi mengenai hak pelayaran inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh berbagai aktor negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi hanya berfungsi sebagai seperangkat norma, melainkan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik (*lawfare*). Negara-negara besar menggunakan tafsir hukum laut untuk memperkuat legitimasi tindakan militernya, sedangkan negara pantai memanfaatkan ruang interpretasi tersebut guna mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, pertarungan di Selat Hormuz tidak hanya berlangsung melalui kapal perang, tetapi juga melalui argumentasi hukum.

Menariknya, signifikansi Selat Hormuz tidak hanya terlihat dari aspek politik dan keamanan. Penelitian oseanografi terbaru juga memperlihatkan bahwa kawasan ini memiliki karakteristik lingkungan laut yang unik. Stabilitas massa air, perbedaan suhu dan salinitas, serta proses pencampuran vertikal di kawasan Selat Hormuz membentuk ekosistem laut yang kompleks. Kondisi oseanografi tersebut memengaruhi aktivitas pelayaran, operasi militer, hingga pengelolaan sumber daya kelautan. Artinya, Selat Hormuz tidak hanya penting sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai ruang strategis bagi penelitian ilmiah dan penguasaan teknologi kelautan.

Bagi negara-negara pengimpor energi, pelajaran utama dari dinamika Selat Hormuz adalah pentingnya diversifikasi jalur distribusi energi. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memang telah membangun jaringan pipa yang menghubungkan ladang minyak menuju Laut Merah maupun Teluk Oman. Namun kapasitas jalur alternatif tersebut masih jauh dari cukup untuk menggantikan seluruh volume minyak yang biasanya melewati Selat Hormuz. Oleh sebab itu, ketergantungan dunia terhadap jalur ini masih akan berlangsung dalam jangka panjang.

Indonesia mungkin berada jauh dari Teluk Persia, tetapi bukan berarti kebal terhadap dampak ketidakstabilan di Selat Hormuz. Sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan harga energi global akan meningkatkan tekanan terhadap APBN, memperbesar subsidi energi, mendorong inflasi, serta meningkatkan biaya logistik nasional. Dengan demikian, setiap eskalasi konflik di Selat Hormuz pada akhirnya juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia melalui kenaikan harga bahan bakar, tarif transportasi, maupun harga kebutuhan pokok.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mencegah penutupan Selat Hormuz, melainkan membangun tata kelola keamanan maritim yang mampu menjembatani kepentingan negara pantai dengan kepentingan masyarakat internasional. Diplomasi multilateral, penghormatan terhadap hukum laut internasional, serta pembangunan mekanisme keamanan kolektif menjadi prasyarat penting agar Selat Hormuz tetap berfungsi sebagai jalur perdagangan global yang aman.

Pada akhirnya, Selat Hormuz mengajarkan bahwa dalam era globalisasi, sebuah selat yang lebarnya hanya puluhan kilometer mampu menentukan stabilitas ekonomi dunia. Ketika geopolitik bertemu dengan energi, hukum internasional, dan kepentingan strategis negara-negara besar, maka sebuah kawasan maritim berubah menjadi pusat gravitasi politik global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas Selat Hormuz bukan hanya kepentingan negara-negara Timur Tengah, melainkan kepentingan seluruh masyarakat internasional yang bergantung pada

kelancaran arus perdagangan energi dunia.

Artikel ini disusun dengan mengintegrasikan tiga perspektif utama dari dokumen yang Anda unggah: (1) konflik Iran-Amerika Serikat dan implikasinya terhadap distribusi minyak dunia, (2) dimensi geopolitik serta hukum internasional Selat Hormuz, dan (3) karakteristik oseanografi Selat Hormuz sebagai faktor pendukung kepentingan strategis kawasan. Dengan sedikit penyesuaian panjang (sekitar 900–1.000 kata atau 1.500–1.800 kata), naskah ini dapat disesuaikan dengan format berbagai media opini nasional.

[Baca Artikel Asli di Website](#)

Tentang islamsantun.org:

Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil 'alamin*. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **Alvin Noor Sahab R**

Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said Surakarta

[#Selat Hormuz](#)

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin